

Dr. Ujiyanto Singgih Prayitno, M.Si.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika
2013



Judul:

Pemberdayaan Masyarakat

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xii+160 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-979-9052-91-9

Cetakan Pertama, 2013

Penulis:

Ujianto Singgih Prayitno

Anih Sri Suryani

Sri Nurhayati Qodriyatun

Dina Martiany

A. Muchaddam Fahham

Penyunting:

Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si.

Desain Sampul:

Fery C. Syifa

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya penerbitan buku pemberdayaan masyarakat ini. Buku ini ditulis oleh para peneliti bidang kesejahteraan sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Dua tulisan dalam buku ini merupakan hasil kegiatan penelitian bidang pengkajian. Hasil kegiatan penelitian *pertama*, ditulis oleh Ujianto Singgih Prayitno tentang Penerapan Prinsip Pembangunan Masyarakat terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Batam; *kedua*, ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Kontribusi terhadap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Tiga tulisan lainnya merupakan hasil kajian para penulisnya terhadap suatu fenomena yang urgen untuk dikaji sesuai dengan keahlian masing-masing penulisnya. *Pertama*, ditulis oleh Anih Sri Suryani, tentang Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Daerah Pesisir dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, *kedua*, ditulis oleh Dina Martiany tentang Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Perempuan dan *ketiga*, ditulis A.Muchaddam Fahham yang secara khusus mengkaji Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat. Kesemua tulisan dalam buku ini berbicara tentang pemberdayaan masyarakat namun dengan sorotan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi penerapannya pada program pengentasan kemiskinan di perkotaan dan peningkatan kualitas sanitasi daerah pesisir. Ada juga yang menelaah peran yang dapat dimainkan oleh pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, sementara penulis lainnya melihat pemberdayaan sebagai akibat dari sebuah kebijakan.

Kami menghaturkan terima kasih kepada para peneliti yang dengan tekun telah menulis dan menyumbangkan tulisannya dalam buku ini, kepada Dr. Didiet Widiowati, M.Si. yang telah menulis prolog buku ini, dan kepada saudara Ujianto Singgih Prayitno yang telah menulis artikel, kemudian menyunting artikel-artikel dalam buku ini, dan sekaligus menulis epilog, yang akhirnya buku ini dapat hadir di hadapan pembaca budiman.

Apabila penerbitan buku ini masih mengandung berbagai kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas berbagai

kekurangan tersebut, dan untuk penyempurnaan berbagai kekurangan itu, kami sangat mengharapkan lahirnya kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Akhirnya, kami berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, April 2013

Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Prolog.....	vii

BAGIAN PERTAMA

PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN DI KOTA BATAM

<i>oleh: Ujjianto Singgih Prayitno</i>	1
I. PENDAHULUAN.....	2
II. PEMBANGUNAN MASYARAKAT	7
III. PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN	17
IV. PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM.....	29
V. PENUTUP	42
DAFTAR PUSTAKA	45

BAGIAN KEDUA

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DAERAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

<i>oleh: Anih Sri Suryani</i>	47
I. PENDAHULUAN.....	48
II. PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SANITASI	50
III. TUJUAN DAN KEGUNAAN	50
IV. KERANGKA PEMIKIRAN	51
V. PENINGKATAN KUALITAS SANITASI MASYARAKAT PESISIR.....	57
VI. PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAGIAN KETIGA
RESTORASI EKOSISTEM DI HUTAN PRODUKSI:
KONTRIBUSI TERHADAP KONSERVASI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun 67

I. PENDAHULUAN..... 68

II. RESTORASI EKOSISTEM DALAM KEBIJAKAN
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI 73

III. PELAKSANAAN RESTORASI EKOSISTEM
DI HUTAN PRODUKSI 83

IV. KONTRIBUSI RESTORASI EKOSISTEM
DI HUTAN PRODUKSI BAGI KONSERVASI..... 93

V. KONTRIBUSI RESTORASI EKOSISTEM
DI HUTAN PRODUKSI BAGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN..... 95

VI. PENUTUP 102

DAFTAR PUSTAKA 105

BAGIAN KEEMPAT
EKONOMI KREATIF DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

oleh: Dina Martiany 109

I. PENDAHULUAN..... 110

II. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DI INDONESIA..... 113

III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MELALUI EKONOMI KREATIF..... 121

IV. PENUTUP 128

DAFTAR PUSTAKA 130

BAGIAN KELIMA
PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

oleh: Achmad Muchaddam Fahham 133

I. PENDAHULUAN..... 134

II. ELEMEN-ELEMEN PESANTREN 137

III. TIPOLOGI PESANTREN..... 139

IV. PERAN PESANTREN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT..... 141

V. PENUTUP 150

DAFTAR PUSTAKA 152

Epilog 154

Indeks..... 157

PROLOG

Dr. Didiet Widiowati, M.Si.

Staf Pengajar Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Proses pembangunan sering diidentikkan dengan proses modernisasi, yaitu terwujudnya masyarakat yang mengembangkan kompetensi dan keunggulannya untuk bersaing dan mengkreasi nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Wacana paradigma pembangunan para teoritis sejauh ini masih berada pada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktek. Perdebatan teoritik itu umumnya berkenaan dengan pendekatan ekonomi disatu pihak dan pendekatan politik dipihak lain yang sering saling dipertentangkan. Pendekatan pembangunan ekonomi diwacanakan oleh Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dengan "*invisible hand*" nya, David Ricardo dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, hingga John Maynard Keynes yang mengusulkan perpaduan antara kebebasan dan pengaturan oleh pemerintah. Sementara pendekatan politik, baik dari perspektif kulturalis yang percaya bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi nilai-nilai maju yang mengacu pada nilai di negara maju, ataupun yang berperspektif strukturalis, yaitu yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju karena yang terjadi adalah struktur yang tidak benar, bukan nilai yang tidak benar. Jika ditelisik, pandangan-pandangan ini sangat khas ilmuwan yang cenderung menerapkan pendekatan yang dikuasainya meski tidak bersifat komprehensif untuk mendapatkan pengakuan bahwa pemikiran tersebut memang unggul. Berbeda dengan pendekatan para praktisi yang cenderung bersifat eklektis yang lebih memadukan seluruh pendekatan yang ada, kemudian menyusun dalam tatanan praktik dengan berusaha membuatnya tidak tumpang tindih.

Untuk menjadi praktis dibutuhkan strategi, yaitu "cara" untuk mencapai tujuan, Pada masa orde baru perencanaan pembangunan dihadapkan kepada dua pilihan strategi pembangunan yang dilematis, yaitu prioritas produktivitas atau prioritas demokrasi. Pada masa itu, pemerintah memilih produktivitas dengan keyakinan demokrasi akan tercapai dengan sendirinya

tatkala produktivitas menghasilkan tingkat kemakmuran tertentu bagi rakyat. Strategi ini ternyata tidak berhasil dengan memuaskan, karena pembangunan yang menekan partisipasi dan demokrasi bukan hanya menyebabkan implosi (ledakan ke dalam) namun juga eksplosif (ledakan keluar). Lalu, apakah itu berarti yang tersedia hanya pilihan demokrasi atau partisipasi, mengingat produktivitas merupakan modal dasar pertumbuhan yang penting. Namun demikian, demokrasi dan partisipasi adalah harga yang sulit untuk ditawar, yang suka atau tidak harus diambil. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dinilai akomodatif adalah pemberdayaan, yang membutuhkan reorientasi, restrukturisasi, sekaligus aliansi dalam merumuskan strateginya. Dengan reorientasi, pelaku pemberdayaan menemukan kembali di mana kondisi saat ini, apa yang masih tersisa sebagai potensi penyampaian kesejahteraan bersama. Melalui restrukturisasi dilakukan tata ulang institusi sosial dalam masyarakat dan merekonstruksi nilai lokal agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai serta kondisi riil dan potensial yang dimiliki. Aliansi memungkinkan pelaku pemberdayaan untuk menyetarakan dan menyamakan langkah antar pemangku kepentingan, baik di dalam sektornya maupun lintas sektor.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak, yang bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Kemiskinan bersifat multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan sebuah proses, dan sebagai sebuah pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau kemampuan personal, interpersonal atau politik yang memungkinkan individu, keluarga atau masyarakat dapat melakukan tindakan memperbaiki situasi-situasi yang mempengaruhi kehidupannya. Proses pemberdayaan tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan seseorang atau sekelompok orang, melainkan juga memiliki daya untuk merubah sistem dan struktur sosial, yaitu seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan masyarakat memang ditujukan untuk memberikan kekuatan pada setiap anggotanya dalam menyikapi dan mengambil tindakan yang tepat, untuk keberlangsungan hidup mereka secara berkelanjutan. Keberlangsungan hidup ini tidak hanya terkait pada pembentukan dan pembangunan struktur kelembagaan dan

mekanisme kerja masyarakat, tetapi juga terkait dengan pembangunan nilai-nilai, dan pemberian makna baru pada struktur-struktur tradisional.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan paradigma baru yang tidak hanya bersifat ekonomis ataupun politis, tetapi merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable.*” Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”. Paling tidak dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) yang memerlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi, yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Penerapan pemberdayaan sebagai sebuah strategi terlihat dalam rangkaian tulisan yang ada dalam bunga rampai ini. Tulisan pertama yang Penerapan Prinsip Pembangunan Masyarakat Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Di Kota Batam, merupakan deskripsi pengalaman Kota Batam dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program PNPM. Penerapan model intervensi pengembangan masyarakat (*community development*) dalam program PNPM Mandiri bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat agar masyarakat memahami betul manfaat dan peranannya dalam program peningkatan kesejahteraannya.

Diharapkan, mereka mampu merumuskan kebutuhan/masalah dan potensi/sumber yang dimilikinya, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, dan mampu menyusun rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebagai suatu metode kerja, PNPM melakukannya dengan dua cara, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pada pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, tahap kegiatan tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan, strategi dan teknik serta metodologi tertentu yang diharapkan dapat merangsang prakarsa dan swadaya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan.

Selanjutnya, terdapat artikel yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Daerah Pesisir Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa akses masyarakat pesisir terhadap informasi dan persepsi terhadap sanitasi, maupun kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi perlu ditingkatkan dengan cara mengubah perilaku dan meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: inisiatif awal berupa penyadaran kepada masyarakat pesisir akan sanitasi dan pola hidup sehat, perumusan oleh masyarakat sendiri terhadap hal-hal yang diinginkan dalam rangka peningkatan kualitas sanitasi, pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dirumuskan, dan terakhir pengembangan berupa pemantauan dan evaluasi dalam rangka perbaikan terus menerus dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sanitasi di daerah pesisir merupakan sebuah kebutuhan, agar potensi sumber daya pesisir dapat menunjang pembangunan. Bila akses sanitasi ditingkatkan secara maksimal maka dapat berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang serius akan hal ini.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan terhadap korban bencana alam, termasuk bencana yang diakibatkan oleh kerusakan hutan. Kebijakan pengusahaan hutan dimasa lalu telah banyak menimbulkan kerusakan hutan. Rusaknya hutan menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Banjir, longsor, kekeringan, tingginya emisi karbon hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan menjadi akibat lanjutan dari rusaknya hutan yang ada. Sementara upaya pemerintah melakukan rehabilitasi melalui penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan rakyat kemasyarakatan, gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan, hingga perbenihan tanaman hutan belum memberikan hasil bagi pemulihan hutan yang rusak. Kemudian

muncul kebijakan pemerintah untuk melakukan pemulihan hutan yang rusak dengan melibatkan pihak swasta melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi. Artikel dalam buku ini yang berjudul Restorasi Ekosistem Di Hutan Produksi: Kontribusi Terhadap Konservasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, menguraikan hal itu. Penulisnya menyimpulkan, bahwa kegiatan restorasi ekosistem secara teori memberikan sumbangan bagi konservasi sumber daya alam hayati. Namun adanya ketentuan penebangan dilakukan setelah terjadi keseimbangan ekosistem, menjadikan kebijakan restorasi ekosistem ini menjadi tidak jelas arah yang dimaksudkan. Jika kebijakan restorasi ekosistem ini dimaksudkan untuk mengembalikan hutan yang rusak, maka seharusnya tidak boleh ada izin penebangan meskipun ekosistem sudah dalam kondisi seimbang. Pemberian izin restorasi ekosistem pun tidak seharusnya ada dalam bungkus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Karena dalam UU Kehutanan, pemanfaatan hutan produksi tidak hanya sebatas pemanfaatan hasil hutan kayu saja, tetapi dapat juga berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dua artikel terakhir dalam buku ini mengulas secara khusus strategi pemberdayaan bagi kelompok tertentu, yaitu *pertama*, pemberdayaan terhadap perempuan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pemberdayaan perempuan melalui ekonomi diperlukan untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender. Pada prinsipnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan bukan hanya sebatas untuk memperoleh penghasilan, namun lebih pada upaya membuat perempuan lebih memiliki kemandirian. Pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Apabila perempuan berkesempatan memperoleh pemberdayaan secara ekonomi, mereka akan dapat menjadi agen penting dalam perubahan dan proses perbaikan di dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi sangat terkait erat. Pembangunan akan mendorong pemberdayaan perempuan dan sebaliknya dengan pemberdayaan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Bagaimanapun pemberdayaan perempuan dan pembangunan saling mempengaruhi secara mutual dan perempuan dapat menjadi partner yang setara dalam masyarakat yang lebih sejahtera. Pengembangan ekonomi kreatif dan perwujudan pembangunan industri kreatif dianggap sebagai salah satu bidang pembangunan ekonomi yang dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Perempuan yang selama ini banyak yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah, diharapkan dapat menjadi agen utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jenis usaha kreatif menjadikan kreativitas sebagai modal utama

dan cenderung tidak memerlukan modal finansial yang besar. Dari sisi aksesibilitas usaha ekonomi kreatif lebih mudah diakses oleh perempuan, baik dari sisi keterampilan, pasar, maupun manajemen pengelolaan, termasuk fleksibilitas waktu.

Kedua, pemberdayaan yang dilakukan di pesantren, yang memiliki beberapa peran, yaitu: (1) pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan dan (2) pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan keagamaan pesantren berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam, tempat pelestarian budaya, dan tempat pembinaan lahirnya ulama-ulama Islam. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pesantren berfungsi sebagai fasilitator, inisiator, perantara, dan institusi lokal. Sebagai fasilitator, pesantren memfasilitasi masyarakat dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagai inisiator, pesantren menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Dalam bentuk ini pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan tujuan pengembangan diri mereka sendiri, menjadi pelaksana utama sendiri, melakukan evaluasi dan menindaklanjuti sendiri dan menikmati hasilnya. Sebagai institusi perantara pesantren dapat berfungsi sebagai alat pendengar sekaligus penyambung suara masyarakat. Sebagai alat pendengar, pesantren bertugas untuk mendengarkan suara-suara masyarakat, keluh kesah masyarakat atas beban hidup yang mereka hadapi. Sebab suatu masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dan kapasitas pada umumnya tidak mampu menyuarakan segala aspek persoalan hidup mereka kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan. Sebagai pengeras suara pesantren berfungsi untuk menyuarakan aspirasi, harapan, dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan.